

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Genap 2019

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PUNGUTAN RETRIBUSI LABUH JANGKAR

NPM: 17125217
Hendra Saputra

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kegiatan labuh jangkar kapal yang memanfaatkan wilayah perairan Kepulauan Riau dan tidak terdapatnya sistem pungutan retribusi labuh jangkar yang terstruktur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta permasalahan terkait dengan kewenangan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan solusi hukum dalam pengaturan yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pungutan retribusi labuh jangkar tanpa menyebabkan masalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Objek penelitian terdiri dari data hukum sekunder yang menghasilkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis data yang diterapkan adalah yuridis kualitatif.

Hingga saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan masih melakukan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah Laut Kepulauan Riau. Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam wewenang pemanfaatan ruang laut dari titik 0 hingga 12 mil adalah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini akan merangkum apa saja faktor legal dari kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pemerintah, Retribusi, Labuh Jangkar.*